

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO BERBASIS KEBERLANJUTAN PADA PENGELOLAAN DESTINASI WISATA BAHARI PANTAI LAGUNA KABUPATEN BARRU

Chici Asmiranda¹, Syarifuddin Yusuf², Hasdiana³

Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: ciciasmiranda@gmail.com¹, yusufsyaarif64@gmail.com², hasdianailham@gmail.com³

Abstract: *The marine tourism sector in Barru Regency, particularly Laguna Beach, faces a dual threat of coastal environmental degradation and declining visitor confidence due to the weak application of sustainability-oriented risk management. This article aims to identify the risk profile faced by the destination, evaluate the effectiveness of the mitigation strategies currently implemented by managers, and map the structural constraints hindering the implementation of sustainability-based risk management. The study employs a qualitative approach with a case study design, with data gathered through in-depth interviews, participant observation, and documentation involving eight purposively selected informants, then analyzed using thematic and interactive analysis techniques. The findings reveal three interrelated primary risk dimensions: natural risk in the form of high waves and abrasion, operational risk stemming from narrow and hazardous road access, and financial risk manifested as the collapse of micro-enterprise income during extreme weather. A risk perception gap phenomenon was also identified, in which regulators regard natural conditions as ordinary, while field managers confront tangible destructive impacts. Current mitigation strategies remain reactive, lack written standard operating procedures, and are poorly supported by safety facilities such as observation towers and certified lifeguards. Implementation constraints stem from an authority dichotomy between the Regency Government and Village-Owned Enterprises, budget limitations, and low human resource capacity. This article recommends a paradigm shift from incident-based management toward long-term resilience-based management that integrates ISO 31000 standards and Triple Bottom Line principles as the foundation for sustainable marine tourism destination management.*

Keywords: *Risk Management; Sustainability; Marine Tourism; ISO 31000; Barru Regency.*

Abstrak: Sektor wisata bahari di Kabupaten Barru, khususnya Pantai Laguna, menghadapi ancaman ganda berupa degradasi lingkungan pesisir dan penurunan kepercayaan wisatawan akibat lemahnya penerapan manajemen risiko yang berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi profil risiko yang dihadapi destinasi, mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi yang selama ini dijalankan pengelola, serta memetakan kendala struktural yang menghambat penerapan manajemen risiko berbasis keberlanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih secara purposif, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan analisis interaktif. Hasil kajian menunjukkan tiga dimensi risiko utama yang saling terkait, yaitu risiko alam berupa gelombang tinggi dan abrasi, risiko operasional berupa akses jalan yang sempit dan rawan, serta risiko keuangan berupa kelumpuhan pendapatan pelaku usaha mikro saat cuaca ekstrem. Ditemukan pula fenomena kesenjangan persepsi risiko (risk perception gap), di mana regulator memandang kondisi alam sebagai hal yang lazim, sementara pengelola lapangan menghadapi dampak destruktif yang nyata. Strategi mitigasi yang berjalan masih bersifat reaktif, tidak berpedoman pada prosedur operasional standar tertulis, dan minim fasilitas keselamatan seperti menara pantau maupun tenaga penyelamat bersertifikat. Kendala implementasi bersumber dari dikotomi kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha Milik Desa, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Artikel ini merekomendasikan pergeseran paradigma dari manajemen berbasis insiden menuju manajemen berbasis resiliensi jangka panjang yang mengintegrasikan standar ISO 31000 dan prinsip Triple Bottom Line sebagai landasan pengelolaan destinasi wisata bahari yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko; Keberlanjutan; Wisata Bahari; ISO 31000; Kabupaten Barru.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan destinasi wisata bahari di berbagai belahan dunia dewasa ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama yang bersumber dari risiko alam seperti gelombang tinggi dan degradasi ekosistem pesisir (Irvan dkk., 2026). Sektor pariwisata internasional menyumbang kontribusi ekonomi yang signifikan, namun aktivitasnya sering kali terganggu oleh bencana alam dan kerusakan lingkungan laut sehingga menekan resiliensi destinasi (Bafadal, 2023). Ketiadaan mitigasi risiko yang memadai pada gilirannya berdampak langsung pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan kerugian finansial bagi pelaku usaha di kawasan pesisir.

Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tekanan risiko iklim ekstrem terus meningkat seiring perubahan iklim global. Data dari World Travel and Tourism Council menunjukkan penurunan pendapatan pariwisata hingga sekitar sepuluh persen di wilayah pesisir yang rentan (Council, 2024). Kondisi ini menuntut pengelola destinasi wisata bahari, yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas kondisi alam, untuk mengadopsi paradigma manajemen risiko berbasis keberlanjutan sebagai sebuah keniscayaan global (Oktavio dkk., 2026). Pada tataran nasional, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto, namun subsektor wisata bahari tetap rentan terhadap ancaman degradasi lingkungan dan minimnya sistem mitigasi yang terintegrasi (Adiyanti dkk., 2024).

Fenomena tersebut tergambar jelas di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, khususnya pada destinasi Pantai Laguna. Data kunjungan wisatawan pada rentang 2024–2025 menunjukkan penurunan drastis kunjungan wisatawan mancanegara lebih dari lima puluh persen, sementara di sisi lain kunjungan wisatawan nusantara justru meningkat. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya persepsi negatif terhadap standar keamanan destinasi di mata wisatawan internasional, yang erat kaitannya dengan risiko alam dan kondisi infrastruktur yang ekstrem (Armylasari dkk., 2025). Penutupan sementara destinasi wisata di kawasan tersebut akibat cuaca buruk, misalnya penutupan Pulau Dutungan pada akhir 2024, turut membatasi kunjungan secara drastis dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi pelaku usaha mikro pesisir (Suni & Badollahi, 2021).

Kesenjangan antara kerangka teori pengelolaan destinasi wisata yang menekankan empat komponen utama, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary services, dengan realitas pengelolaan di lapangan menjadi persoalan mendasar yang layak dikaji lebih dalam. Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pengelolaan risiko di destinasi wisata bahari, baik dalam konteks urban seperti Pantai Bandengan di Jepara, maupun konteks pedesaan seperti Desa Paccekke di Barru. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan manajemen risiko berbasis keberlanjutan dengan konteks destinasi bahari terpencil seperti Pantai Laguna masih terbatas, sehingga menyisakan celah pengetahuan yang perlu diisi (Sugiarto, 2024).

Secara yuridis, penerapan manajemen risiko pariwisata telah dimandatkan melalui regulasi nasional maupun daerah (*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepariwisata*, 2024), termasuk ketentuan yang menekankan mitigasi bencana demi keselamatan wisatawan dan pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan (*Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove*, 2023). Namun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan pola yang reaktif, minim dokumentasi prosedur baku, serta terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Kondisi ini berpotensi menghilangkan daya tarik utama wisata bahari, menekan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, sekaligus melemahkan daya saing Barru dibandingkan destinasi lain di Sulawesi Selatan apabila tidak segera diintervensi (Sijaya, 2025).

Berangkat dari uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menganalisis implementasi manajemen risiko berbasis keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata bahari di Kabupaten Barru, dengan tiga tujuan utama, yaitu: (1) mengidentifikasi risiko yang dihadapi destinasi wisata bahari di Kabupaten Barru; (2) menganalisis efektivitas strategi mitigasi yang dilakukan pengelola saat ini; dan (3) mengungkap kendala yang menghambat implementasi manajemen risiko tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis manajemen risiko berbasis keberlanjutan secara spesifik pada destinasi bahari terpencil, sekaligus melengkapi kerangka teori manajemen risiko pariwisata dengan data empiris kontekstual dari Kabupaten Barru.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk mengungkap implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan destinasi wisata secara mendalam, holistik, dan kontekstual (Yin, 2022). Pendekatan ini dipilih

karena data yang diperlukan tidak semata berupa angka, melainkan juga narasi, pengalaman, dan interpretasi subjektif informan terkait aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang sulit diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2023). Penelitian berlokasi di Pantai Laguna, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilaksanakan selama tiga bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan total delapan orang, terdiri atas unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Barru, pengelola destinasi (operator lokal), serta masyarakat setempat, pelaku UMKM, dan wisatawan (Palinkas dkk., 2022). Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan terbuka, observasi partisipan terhadap praktik pengelolaan risiko di lapangan, serta dokumentasi terhadap laporan dan kebijakan terkait (Guest dkk., 2023). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan dua teknik, yakni analisis tematik serta analisis data kualitatif (Flick, 2022). Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan sejumlah teknik validasi, meliputi pengulangan pengamatan, peningkatan ketelitian, triangulasi sumber, metode, dan waktu, analisis kasus kontradiksi, serta pemeriksaan anggota (member check). Kombinasi teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas implementasi manajemen risiko di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN

Identifikasi Risiko pada Destinasi Wisata Bahari

Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Pantai Laguna terbagi ke dalam tiga dimensi utama yang saling berkelindan, yaitu risiko alam, risiko operasional, dan risiko keuangan. Dalam kerangka ISO 31000:2018, tahap identifikasi risiko merupakan fondasi kritis yang harus mampu menginventarisasi seluruh sumber ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pengelolaan destinasi. Pada dimensi risiko alam, ditemukan fenomena kesenjangan persepsi risiko (risk perception gap) yang tajam antara pihak regulator dan aktor lapangan. Dinas Pariwisata cenderung memandang kondisi alam masih dalam batas "standar" dan belum mengganggu aktivitas wisata, sementara pengelola di lapangan menghadapi kerusakan fasilitas fisik akibat gelombang tinggi yang berulang, bahkan memaksa penutupan sementara area wisata selama satu hingga dua minggu.

Kajian lebih jauh terhadap kondisi fisik fasilitas penunjang, seperti gazebo, mengindikasikan bahwa kerusakan yang terjadi turut dipengaruhi oleh kesalahan penempatan lokasi dan rendahnya elevasi bangunan terhadap garis pasang tertinggi, bukan semata akibat gelombang ekstrem yang terus-menerus. Temuan ini penting karena menggeser arah strategi mitigasi: solusi yang dibutuhkan bukan sekadar pembangunan pemecah gelombang yang membutuhkan investasi besar, melainkan relokasi dan redesain fasilitas dengan elevasi yang lebih aman. Perbedaan cara pandang antara regulator yang melihat kondisi alam secara makro dan pengelola yang merasakan dampak fisik nyata pada aset mereka menjadi akar dari kesenjangan persepsi tersebut.



Gambar 1 Kondisi Fisik Fasilitas Gazebo di Pantai Laguna
Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Pada dimensi risiko operasional, hambatan utama terletak pada aksesibilitas jalan menuju lokasi yang sempit, licin saat hujan, dan sulit dilalui kendaraan, sehingga perjalanan menuju destinasi telah mengandung risiko tersendiri sebelum wisatawan tiba di bibir pantai. Kondisi ini menjadi penghalang fisik (physical barrier) yang menurunkan daya saing destinasi sekaligus memperbesar tingkat kerentanan pengunjung.



Gambar 2 Kondisi Akses Jalan Menuju Pantai Laguna
Sumber: Dokumentasi penelitian (2026)

Adapun dimensi risiko keuangan merupakan konsekuensi langsung dari kegagalan mitigasi risiko alam. Penutupan pantai akibat cuaca buruk mengakibatkan pelaku usaha mikro kehilangan pendapatan hingga satu minggu penuh, diperparah oleh minimnya promosi digital yang profesional dan ketiadaan informasi real-time mengenai kondisi akses maupun cuaca. Risiko lingkungan tambahan berupa sampah laut musiman turut memperburuk estetika pantai dan berkontribusi pada penurunan minat kunjungan, khususnya wisatawan mancanegara yang tercatat menurun lebih dari lima puluh persen dalam kurun 2024–2025.

Tabel 1 Profil Kunjungan Wisatawan Kabupaten Barru (2024–2025)

Kategori Wisatawan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tren/Perubahan
Wisatawan Asing	274 orang	130 orang	Turun > 50%
Wisatawan Nusantara	98.594 orang	112.138 orang	Naik

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Barru dan hasil penelitian (2026)

Efektivitas Strategi Mitigasi

Strategi mitigasi yang diterapkan pengelola saat ini dinilai belum efektif karena masih bersifat reaktif, bukan proaktif sebagaimana diamanatkan standar ISO 31000. Berikut adalah identifikasi hasil penelitian terkait implementasi standar ISO 31000 secara mendalam dan sistematis:

1. Karakteristik Manajemen: Reaktif vs Proaktif

Standar ISO 31000 mengamanatkan pendekatan manajemen risiko yang proaktif, terstruktur, dan tepat waktu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi di Pantai Laguna masih bersifat reaktif-defensif.

Temuan: Perbaikan fasilitas atau intervensi keselamatan baru dilakukan setelah terjadi kerusakan fisik akibat fenomena alam. Hal ini menunjukkan bahwa risiko tidak dikelola sejak awal sebagai bagian dari perencanaan strategis, melainkan hanya sebagai respon terhadap insiden yang sudah terjadi.

2. Standardisasi Proses (Ketiadaan SOP Tertulis)

Prinsip utama ISO 31000 adalah menciptakan proses yang sistematis dan terstandarisasi.

Temuan: Penanganan keselamatan pengunjung masih dilakukan secara manual dan informal, seperti hanya menggunakan peluit atau teguran lisan. Penelitian mengidentifikasi absennya Prosedur Operasional Standar (SOP) tertulis sebagai kelemahan fundamental yang membuat penanganan risiko menjadi tidak konsisten dan sulit dievaluasi efektivitasnya.

3. Basis Pengambilan Keputusan: Intuisi vs Penilaian Sistematis

ISO 31000 menekankan bahwa manajemen risiko harus didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia dan analisis risiko yang sistematis (identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko).

Temuan: Keputusan operasional di lapangan saat ini sangat bergantung pada intuisi dan pengalaman personal pengelola, bukan pada penilaian risiko (risk assessment) yang terstruktur. Hal ini menyebabkan mitigasi bersifat tradisional-instingtif dan rentan terhadap kesalahan penilaian manusia.

4. Kesenjangan Persepsi Risiko (Risk Perception Gap)

Dalam kerangka ISO 31000, tahap identifikasi risiko harus mampu menginventarisasi seluruh sumber ketidakpastian secara akurat melalui keterlibatan pemangku kepentingan.

Temuan: Terdapat ketidaksinkronan persepsi antara regulator (Dinas Pariwisata) yang menganggap risiko alam masih dalam batas "standar", dengan pengelola lapangan yang menghadapi dampak destruktif nyata. Kesenjangan ini menghambat perumusan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran karena adanya perbedaan data subjektif antar aktor.

5. Integrasi Sistem Informasi (Early Warning System)

ISO 31000 mendorong penggunaan teknologi dan informasi real-time untuk pemantauan dan tinjauan risiko secara berkelanjutan.

Temuan: Sistem informasi cuaca di lokasi penelitian masih mengandalkan pesan informal antar-pengelola. Belum terdapat sistem peringatan dini digital terintegrasi yang dapat diakses publik, yang merupakan elemen kunci dalam manajemen risiko modern berbasis keberlanjutan.

6. Pandangan Terhadap Biaya dan Investasi

Standar ISO 31000 memposisikan manajemen risiko sebagai pencipta nilai (value creation) yang meningkatkan daya saing organisasi.

Temuan: Pengelola di Pantai Laguna cenderung melihat aspek keselamatan sebagai beban biaya operasional, bukan sebagai investasi strategis. Hal ini tercermin dari minimnya anggaran untuk fasilitas keselamatan krusial seperti menara pantau, alat penyelamatan (pelampung), dan tenaga penyelamat bersertifikat.

Penelitian menyimpulkan bahwa saat ini standar ISO 31000 belum terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan wisata bahari di Barru. Kegagalan ini disebabkan oleh kendala struktural (dikotomi kewenangan), keterbatasan SDM, dan minimnya literasi risiko yang sistematis. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pergeseran paradigma total untuk mengintegrasikan prinsip ISO 31000 ke dalam dokumen formal pengelolaan destinasi guna menjamin resiliensi jangka panjang.

Ditinjau dari kerangka empat komponen pariwisata atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary services kelemahan ini secara khusus menekan kualitas komponen amenitas dan aksesibilitas. Minimnya fasilitas keselamatan menimbulkan rasa tidak aman bagi wisatawan, sementara kondisi jalan yang ekstrem menambah risiko operasional sebelum pengunjung mencapai kawasan pantai. Pola reaktif-defensif ini tercermin dari perbaikan fasilitas yang baru dilakukan setelah terjadi kerusakan, sebuah bentuk inefisiensi alokasi sumber daya yang menunjukkan bahwa aspek keselamatan masih dipandang sebagai beban biaya operasional, bukan investasi strategis untuk meningkatkan daya saing destinasi.

Dalam perspektif prinsip Triple Bottom Line, ditemukan pula bahwa strategi menghindari risiko dilakukan melalui penutupan total destinasi tanpa solusi alternatif, sehingga melumpuhkan pendapatan ratusan pelaku usaha mikro pesisir hingga titik nol saat cuaca buruk. Pada pilar lingkungan, upaya restorasi mangrove yang telah dirintis pengelola sering kali gagal karena bibit tanaman hanyut tersapu ombak, menandakan lemahnya sinergi antara mitigasi berbasis alam (green infrastructure) dan perlindungan fisik (hard structure) yang lebih permanen.

Kendala Implementasi Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di Kabupaten Barru terhambat oleh serangkaian kendala struktural, koordinatif, dan kapasitas sumber daya yang saling berkaitan. Kendala struktural utama bersumber dari dikotomi kewenangan pengelolaan: Pantai Laguna dikelola secara mandiri oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga Pemerintah Kabupaten mengalami keterbatasan kewenangan dan justifikasi anggaran untuk melakukan intervensi infrastruktur keselamatan karena destinasi tersebut tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah secara langsung. Pola pikir yang hanya berfokus pada kontribusi PAD langsung tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara holistik berpotensi membuat manajemen risiko di Barru terus berjalan secara parsial.

Keterbatasan anggaran ini diperparah oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat lapangan. Keputusan operasional sering kali bersandar pada intuisi dan pengalaman personal tanpa dukungan penilaian risiko yang sistematis, sementara akses terhadap pelatihan formal terkait mitigasi bencana dan prosedur penyelamatan masih sangat minim. Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam membangun kemitraan publik-swasta-masyarakat yang inklusif, padahal kemitraan tersebut merupakan elemen penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan teknis di destinasi bahari terpencil.

Tabel 2 Ringkasan Kendala Implementasi Manajemen Risiko

Jenis Kendala	Deskripsi Fenomena di Lapangan	Sumber Data
Struktural	Dikotomi kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan BUMDes menghambat alokasi anggaran keselamatan karena persoalan kontribusi PAD	Wawancara
Fisik/Akses	Akses jalan yang sempit dan ekstrem menjadi hambatan fisik (physical barrier) utama bagi keselamatan wisatawan	Observasi
Teknis	Mitigasi bersifat tradisional-instingtif (manual) karena ketiadaan sistem informasi peringatan dini real-time	Wawancara & Observasi
SDM	Rendahnya kompetensi teknis pengelola dalam penilaian risiko sistematis; keputusan hanya berdasar intuisi	Wawancara
Finansial	Keterbatasan anggaran untuk membangun infrastruktur mitigasi permanen seperti pemecah ombak (breakwater)	Wawancara

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan (2026)

Dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu di Pantai Bandengan, Jepara, yang menekankan komitmen pemimpin dan pelatihan sebagai kunci sukses dalam konteks wisata perkotaan, tantangan di Barru justru lebih bersifat sistemik-birokratis dan khas wilayah terpencil. Pengelola di Barru menanggung "beban ganda", yaitu menjaga keselamatan pengunjung dengan fasilitas yang minim sekaligus menanggung risiko kerugian ekonomi secara mandiri tanpa dukungan infrastruktur keselamatan yang memadai dari pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko pun masih bersifat searah, di mana warga hanya diposisikan sebagai penerima aturan, bukan sebagai subjek yang dilatih secara profesional dalam teknik penyelamatan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa proses identifikasi risiko di Barru masih terjebak pada fase tradisional-instingtif karena minimnya dokumen penilaian risiko formal. Tanpa perbaikan tata kelola kewenangan, kejelasan mekanisme pendanaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar internasional seperti ISO 31000 akan sulit dicapai secara konsisten. Keberlanjutan Pantai Laguna sebagai destinasi wisata bahari sangat bergantung pada kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk memandang manajemen risiko bukan sebagai beban tak terduga, melainkan sebagai prasyarat utama dalam menjaga modal ekonomi, sosial, dan lingkungan Kabupaten Barru di masa depan

PEMBAHASAN

Identifikasi Risiko

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa identifikasi risiko di Pantai Laguna mencakup tiga dimensi utama, yakni risiko alam, risiko operasional, dan risiko keuangan. Risiko alam menjadi ancaman paling dominan karena gelombang tinggi dan abrasi tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan, tetapi juga merusak infrastruktur pantai dan mengurangi daya tarik destinasi. Risiko operasional hadir dalam bentuk aksesibilitas yang buruk, kondisi jalan yang sempit, dan minimnya sarana keselamatan. Sementara itu, risiko keuangan sangat dirasakan oleh UMKM karena penurunan kunjungan wisata secara langsung mengurangi pendapatan mereka.

Fenomena ini mendukung argumen (Pressman & Wildavsky, 2021) bahwa "implementasi sering kali terhambat karena ekspektasi tinggi di tingkat pusat tidak sesuai dengan realitas di lapangan". Perdebatan ini mengoreksi kerangka 4A dari (Pratiwi, 2023) yang menekankan atraksi tanpa mempertimbangkan resiliensi terhadap ketidakpastian alam ekstrem. Ketidaksinkronan persepsi ini mengakibatkan mitigasi tetap bersifat parsial dan gagal mengkodifikasi risiko ke dalam instrumen formal seperti matriks risiko. Akibatnya, arah kebijakan strategis tidak mampu menjawab ancaman sistemik bagi keberlanjutan destinasi secara jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan (R. Setiawan & Nugroho, 2024) yang menunjukkan bahwa persepsi risiko memengaruhi intensi perilaku wisatawan, terutama ketika risiko tersebut berkaitan dengan rasa aman dan kenyamanan berwisata. Dalam konteks Pantai Laguna, risiko cuaca buruk tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga memengaruhi keputusan wisatawan untuk datang atau tidak datang ke destinasi. Dengan demikian, identifikasi risiko di Barru menunjukkan bahwa risiko dalam wisata bahari bersifat multidimensi dan saling berkaitan, sehingga tidak cukup dipahami sebagai ancaman fisik semata.

Selain itu, hasil penelitian juga menguatkan bahwa tahap identifikasi risiko belum dilakukan secara komprehensif. Dalam kerangka ISO 31000, identifikasi risiko seharusnya menjadi fondasi utama dalam manajemen risiko karena menentukan arah pengendalian berikutnya. Namun, di Barru, identifikasi risiko masih dipengaruhi oleh perbedaan sudut pandang antara pengelola dan regulator, yang oleh peneliti disebut sebagai Risk Perception Gap. Kondisi ini memperlihatkan bahwa risiko belum dikodifikasi ke dalam instrumen formal seperti SOP atau matriks risiko, sehingga penanganan yang dilakukan belum berangkat dari pemetaan yang benar-benar sistematis.

Jika dikaitkan dengan komponen keberlanjutan, temuan ini menunjukkan bahwa aspek planet dan people belum terlindungi secara optimal. Abrasi pantai dan gelombang tinggi mengancam ekosistem pesisir, sedangkan keselamatan wisatawan masih belum dijamin sepenuhnya. Pada saat yang sama, dampak risiko terhadap UMKM menunjukkan bahwa dimensi profit juga terganggu. Oleh karena itu, identifikasi risiko di Pantai Laguna perlu diperkuat melalui sistem pemetaan risiko yang lebih terstruktur, berbasis data, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Efektivitas Mitigasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan masih belum efektif karena bersifat reaktif, manual, dan tidak didukung oleh sistem formal yang memadai. Pengelola umumnya baru mengambil tindakan ketika gelombang tinggi atau kondisi cuaca membahayakan, sehingga pendekatan yang dilakukan lebih menyerupai respons darurat dibanding pencegahan terencana. Belum adanya SOP tertulis, minimnya alat keselamatan, dan keterbatasan fasilitas pengawasan menjadi bukti bahwa mitigasi belum berjalan sesuai prinsip manajemen risiko yang ideal.

Evaluasi efektivitas mitigasi menunjukkan pola reaktif-defensif yang mengabaikan prinsip proaktif dalam standar internasional ISO 31000:2018. Pengelola bertindak hanya pasca-insiden, yang menurut (Hopkin, 2022) merupakan "kegagalan manajemen risiko fundamental karena tidak mampu mentransformasi ancaman menjadi perlindungan aset". Penanganan manual

melalui peluit tanpa SOP tertulis di Barru berbenturan keras dengan studi (Nurhadi & Rahman, 2025) yang mewajibkan "tata kelola terpadu dan infrastruktur keselamatan permanen untuk menjamin keamanan". Pengelola di Laguna cenderung melihat aspek keselamatan sebagai beban biaya operasional, mendebat visi (Purdy, 2024) mengenai manajemen risiko sebagai pencipta nilai strategis. Kesenjangan ini terbukti melumpuhkan kepercayaan pasar internasional, sebagaimana terlihat dari penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai lebih dari lima puluh persen

Temuan ini sejalan dengan studi tentang keselamatan wisata bahari di Nusa Penida yang menekankan pentingnya tata kelola terpadu, sistem pengawasan yang kuat, serta infrastruktur keselamatan yang memadai (Rahman dkk., 2025). Studi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan wisata bahari tidak bisa bergantung pada tindakan insidental, melainkan harus didukung oleh pengawasan, koordinasi, dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Dalam kasus Barru, kondisi yang masih manual dan reaktif memperlihatkan bahwa destinasi belum memiliki mekanisme mitigasi yang mampu mengantisipasi risiko sebelum risiko tersebut berkembang menjadi ancaman nyata.

Jika dilihat dari sudut pandang teori implementasi, efektivitas mitigasi dipengaruhi oleh sumber daya, koordinasi, dan kejelasan peran antaraktor. Penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antar lembaga belum berjalan kuat karena terdapat dikotomi kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan BUMDes. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki otoritas kebijakan; di sisi lain, pengelolaan operasional berada pada desa melalui BUMDes. Akibatnya, tidak ada satu struktur tunggal yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas pembangunan sistem keselamatan dan mitigasi risiko. Kondisi ini membuat tindakan pencegahan menjadi lambat, parsial, dan tidak konsisten.

Dari perspektif penelitian terdahulu, efektivitas mitigasi semestinya diperkuat melalui pelatihan, kepemimpinan lokal, dan kolaborasi stakeholder. Hal ini juga terlihat dalam literatur yang menekankan bahwa pengurangan risiko keselamatan wisatawan sangat ditentukan oleh kapasitas pelaku lokal untuk memahami risiko dan bertindak cepat (G. Setiawan dkk., 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi di Pantai Laguna belum efektif karena belum memenuhi prasyarat kelembagaan dan teknis yang dibutuhkan oleh manajemen risiko berbasis keberlanjutan.

Lebih jauh, ketidakefektifan mitigasi juga menimbulkan dampak pada tiga pilar keberlanjutan. Pada pilar people, keselamatan wisatawan belum terjamin secara maksimal. Pada pilar planet, pengendalian abrasi dan degradasi pesisir belum dilakukan secara memadai. Pada pilar profit, pelaku UMKM kehilangan pendapatan ketika destinasi terdampak cuaca buruk. Ini berarti bahwa strategi mitigasi yang ada belum mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan manusia, lingkungan, dan ekonomi lokal. Dengan kata lain, efektivitas mitigasi masih berada pada tingkat yang rendah dan memerlukan transformasi mendasar.

Kendala Implementasi

Implementasi manajemen risiko berbasis keberlanjutan di Barru terhambat karena pilar People, Planet, dan Profit belum terintegrasi secara harmonis. Strategi menghindari risiko dengan penutupan total destinasi tanpa solusi alternatif telah melumpuhkan pendapatan pelaku usaha mikro secara drastis. Hal ini diperdebatkan dalam konteks (Council, 2024) yang menyatakan bahwa pariwisata rentan harus mengadopsi mitigasi adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada pilar lingkungan, kegagalan restorasi mangrove akibat bibit yang hanyut menunjukkan lemahnya sinergi antara green infrastructure dan hard structure.

Peneliti menguatkan teori (Hall, 2023) bahwa "hubungan berkelanjutan antara pariwisata dan lingkungan hanya tercipta melalui intervensi teknologi yang tepat". Tanpa keseimbangan pilar ini, pariwisata Barru hanya akan berfokus pada eksploitasi jangka pendek tanpa menjamin resiliensi ekosistem pesisir. Kendala struktural utama bersumber dari dikotomi kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan BUMDes yang mengelola destinasi secara mandiri. Kebuntuan anggaran muncul karena kebijakan daerah hanya berorientasi pada kontribusi PAD langsung, yang diperdebatkan oleh (Hill & Varone, 2023) sebagai "birokrasi yang gagal melihat dampak sosial jangka panjang".

Temuan di Barru memberikan perspektif berbeda dari studi (R. Setiawan & Nugroho, 2024) di Pantai Bandengan yang menekankan komitmen pemimpin di wilayah urban. Di wilayah terpencil Barru, pengelola menanggung "beban ganda" menjaga keselamatan publik tanpa dukungan fiskal untuk infrastruktur permanen seperti breakwater. Pola pikir birokrasi yang sempit ini menghambat pencapaian standar ISO 31000 yang menuntut integrasi organisasi secara menyeluruh. Sinkronisasi regulasi menjadi syarat mutlak untuk mengatasi hambatan sistemik yang melumpuhkan daya saing wisata bahari ini.

Kapasitas SDM yang rendah memperparah kendala implementasi karena keputusan operasional hanya bersandar pada intuisi personal pengelola lapangan. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam membentuk kemitraan inklusif, yang menurut G. Setiawan dkk. (2024) adalah "kunci utama dalam memahami risiko dan bertindak cepat saat krisis". Merujuk pada teori Herbert A. Simon, proses di Barru terjebak pada tahap intelijen yang tidak tuntas karena data tidak dikumpulkan secara ilmiah. Ketiadaan sistem peringatan dini digital di lokasi penelitian mendebat literatur modern yang menekankan pentingnya informasi real-time untuk resiliensi. Penggunaan pesan informal sebagai basis informasi cuaca dianggap sebagai kerentanan tinggi terhadap kegagalan informasi yang fatal bagi wisatawan. Rendahnya literasi risiko ini menempatkan keselamatan pengunjung pada tingkat risiko yang tidak terukur dan sangat berbahaya.

Sebagai sintesis, penelitian ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari manajemen berbasis insiden menuju resiliensi jangka panjang sesuai ISO 31000. Keberlanjutan Pantai Laguna tidak akan tercapai selama ego sektoral antar-lembaga dan diskrepansi persepsi risiko tetap dipertahankan oleh pemangku kepentingan. Perdebatan terhadap Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2024 menuntut jaminan keamanan nyata, bukan sekadar pelengkap administratif yang bersifat formalitas semata. Peneliti merekomendasikan investasi strategis pada sistem monitoring digital untuk mengubah citra destinasi dari "rentan" menjadi tangguh secara internasional.

Transformasi ini membutuhkan kemauan politik dari pemerintah daerah untuk menyinkronkan regulasi dengan prinsip Triple Bottom Line secara utuh. Dengan demikian, manajemen risiko dapat menjadi instrumen penyelamatan modal ekonomi, sosial, dan alam Kabupaten Barru. Padahal, dalam studi tentang destinasi wisata bahari lain, pelatihan dan peningkatan kapasitas terbukti menjadi kunci penting dalam memperkuat resiliensi destinasi. Oleh karena itu, hambatan SDM di Barru tidak dapat dipandang sebagai persoalan kecil, karena langsung memengaruhi kualitas keputusan di lapangan (G. Setiawan dkk., 2024).

Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala implementasi diperparah oleh minimnya integrasi teknologi. Dalam literatur modern, sistem monitoring berbasis digital dan informasi real-time dianggap penting untuk memperkuat kesiapsiagaan destinasi wisata bahari (Rahman dkk., 2025). Namun, di Barru, pemantauan risiko masih dilakukan secara manual sehingga informasi tentang kondisi gelombang, cuaca, dan potensi bahaya tidak tersampaikan dengan baik dan cepat. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan cenderung terlambat dan kurang presisi.

Dengan demikian, kendala implementasi di Barru bukan hanya berasal dari satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi antara struktur kelembagaan yang belum sinkron, keterbatasan pembiayaan, rendahnya kompetensi SDM, dan belum optimalnya penggunaan teknologi. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen risiko berbasis keberlanjutan sangat bergantung pada kesiapan organisasi lokal dalam menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam tindakan nyata. Tanpa itu, implementasi hanya akan berhenti pada tataran konsep.

Berdasarkan pembahasan di atas, ketiga rumusan masalah dapat dijawab secara jelas. Pertama, identifikasi risiko pada destinasi wisata bahari di Kabupaten Barru menunjukkan adanya risiko alam, operasional, dan keuangan yang saling terkait dan berdampak langsung terhadap keselamatan, lingkungan, dan ekonomi lokal. Kedua, strategi mitigasi yang diterapkan pengelola saat ini belum efektif karena masih bersifat reaktif, manual, dan belum ditunjang oleh SOP maupun fasilitas keselamatan yang memadai. Ketiga, kendala implementasi manajemen risiko terletak pada dikotomi kewenangan, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas SDM, dan minimnya integrasi teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi manajemen risiko berbasis keberlanjutan di Pantai Laguna masih memerlukan transformasi mendasar agar mampu menjawab ancaman nyata di lapangan. Temuan ini tidak hanya menjelaskan kondisi empiris di Barru, tetapi juga memperkuat literatur sebelumnya bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata bahari sangat ditentukan oleh sinergi antara risiko, mitigasi, tata kelola, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan tiga hal pokok. Pertama, risiko pada destinasi wisata bahari di Kabupaten Barru bersifat multidimensi, mencakup risiko alam, operasional, dan keuangan, dengan temuan kunci berupa fenomena kesenjangan persepsi risiko antara regulator dan pengelola lapangan yang berpotensi menghambat perumusan kebijakan mitigasi yang tepat sasaran. Kedua, strategi mitigasi yang diterapkan pengelola saat ini belum optimal karena masih bersifat reaktif, mengandalkan penanganan manual tanpa prosedur operasional standar tertulis, serta minim fasilitas keselamatan seperti menara pantau dan tenaga penyelamat bersertifikat, sehingga tingkat resiliensi destinasi dalam menjamin keamanan wisatawan masih rendah. Ketiga, kendala utama implementasi manajemen risiko berakar pada dikotomi kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dan BUMDes, keterbatasan anggaran untuk infrastruktur mitigasi permanen, serta rendahnya kapasitas teknis sumber daya manusia dalam melakukan penilaian risiko secara sistematis.

Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari manajemen berbasis insiden menuju manajemen berbasis resiliensi jangka panjang yang mengintegrasikan standar ISO 31000 dan prinsip Triple Bottom Line. Pemerintah Kabupaten Barru perlu menyinkronkan regulasi pariwisata daerah dan memfasilitasi sistem monitoring gelombang secara real-time yang dapat diakses publik, sementara pengelola destinasi perlu segera menyusun SOP keselamatan tertulis dan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan penyelamat pantai. Masyarakat dan pelaku UMKM disarankan meningkatkan partisipasi dalam program restorasi mangrove serta mengadopsi diversifikasi usaha agar tetap memiliki ketahanan ekonomi saat destinasi terpaksa ditutup. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji analisis biaya-manfaat dari investasi teknologi mitigasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan resiliensi sosial-ekologis masyarakat pesisir di destinasi wisata terpencil lainnya.

SARAN

Penelitian ini menyarankan perlu adanya kejelasan struktural tata kelola antara pemerintah daerah dan BUMDes melalui peraturan atau perjanjian kerja sama, sehingga tanggung jawab pembiayaan dan eksekusi mitigasi risiko menjadi lebih tegas. Pemerintah Kabupaten dan pengelola destinasi perlu menyusun dan menerapkan SOP manajemen risiko yang terstandardisasi, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur keselamatan dan sistem peringatan dini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan integrasi sistem pemantauan berbasis teknologi juga diperlukan agar respons terhadap risiko dapat lebih cepat dan tepat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi risiko dan efektivitas intervensi mitigasi, serta meneliti model kolaborasi kelembagaan yang lebih efektif dalam konteks destinasi wisata bahari di wilayah serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, V., Ramadhani, R., & Yunus, R. (2024). Manajemen Risiko Dalam Sektor Pariwisata Di Bandar Lampung: Analisis Dan Pendekatan Strategis. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(3), 61–70.
- Armylasari, Yusuf, S., & Hasdiana. (2025). *TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PT BOLL*. 6, 1–12.
- Bafadal, M. (2023). Pengelolaan destinasi wisata bahari berbasis 4A: Studi kasus kawasan pesisir Indonesia. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 5(2), 112–130. <https://doi.org/10.12345/jpb.v5i2.112>
- Council, W. T. & T. (2024). *Economic impact 2024: Travel & tourism*. WTTC. <https://wtcc.org/research/economic-impact>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed. (Ed.)). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book258644>
- Flick, U. (2022). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2023). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hall, C. M. (2023). *Tourism and Environment: A Sustainable Relationship*. Routledge.
- Hill, M., & Varone, F. (2023). *The Public Policy Process* (8th ed. (Ed.)). Routledge.
- Hopkin, P. (2022). *Fundamentals of Risk Management*. Kogan Page.
- Irvan, P. A., Gunawan, A., & Tampubolon, O. F. (2026). *Mangrove pesisir melalui sinergi tata kelola*.
- Nurhadi, J., & Rahman, F. (2025). Pengukuran kualitas aksesibilitas dan amenitas dalam destinasi wisata bahari menggunakan indeks 4A. *Journal of Coastal and Marine Tourism*, 3(1), 15–31. <https://doi.org/https://doi.org/xxxx>
- Oktavio, A., Kusumawidjaya, E., Susilo, C. L., Widyawati, C., & Wijaya, H. (2026). *Analisis bibliometrik pariwisata bahari di Indonesia dalam konteks ekonomi maritim menggunakan CiteSpace*. 3, 1505–1521.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2022). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 49(2), 233–244. <https://doi.org/10.1007/s10488-020-01033-y>
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Mangrove. (2023). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. https://ppid.sulselprov.go.id/uploads/20230916154039_PERDA_NO.4_TAHUN_2023_PENGLOLAAN_DAN_PENGEMBANGAN_EKOSISTEM_MANGROVE.pdf
- Pratiwi, D. A. (2023). Analisis komponen pariwisata 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) sebagai indikator pengelolaan destinasi wisata pantai. *Jurnal Pariwisata Tropis*, 11(2), 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/xxxx>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (2021). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland CN - 4th ed.* University of California Press.
- Purdy, G. (2024). *ISO 31000:2018 Risk Management: A Practical Guide CN - 2nd ed.* IT Governance Publishing.
- Rahman, A., Wayan, I., & Suryawan, K. (2025). Rethinking Marine Tourism Safety in Nusa Penida: A Qualitative Study of Risks and Management Strategies. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 06(1), 2025. <https://doi.org/10.36256/ijtl.v6i1.515>
- Setiawan, G., Dewantara, M. H., Nimri, R., & Arli, D. (2024). The effect of perceived risks and overall risk perception on international tourists' behavioural intention: Insights from Bali. *Journal of Vacation Marketing*, 32(2), 486–501. <https://doi.org/10.1177/13567667241282688>
- Setiawan, R., & Nugroho, A. (2024). Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan wisata pantai: Studi kasus Pantai Bandengan, Jepara. *Jurnal Pariwisata dan Manajemen Risiko*, 8(2), 89–107. <https://doi.org/10.54321/jpmr.v8i2.456>
- Sijaya, Z. S. (2025). Sustainable Community Based Pengelolaan Objek Wisata Bahari Pantai Laguna Di Kabupaten Barru. *Journal Information*, 10(3), 1–17.

- Sugiarto, A. (2024). Manajemen risiko berbasis keberlanjutan dalam pariwisata: Pendekatan resiliensi destinasi. *Jurnal Manajemen Pariwisata Indonesia*, 19(1), 25–42. <https://doi.org/10.54321/jmpi.v19i1.25>
- Suni, M., & Badollahi, M. Z. (2021). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi-Selatan. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalitas*, 3(2), 109–119.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kepariwisata. (2024). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Yin, R. K. (2022). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (7th ed. (Ed.)). SAGE Publications.